

## KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG MELALUI *DISCRETIONARY ACCRUALS*

Kiswanto  
Ahmad Nurkhin

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang  
Gd.C6 Lt.2 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229.

### *Abstract*

*Government's efforts to boost revenue from the tax sector brought considerable consequences for businessmen. This made businessmen try to do tax planning, one of which was to conduct earnings management to reduce payable taxes. This study examined whether managerial ownership influenced the amount of payable income tax of corporate taxpayers through discretionary accruals. This study used path analysis approach (Path Analysis) by taking sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009. The results showed that managerial ownership directly influenced the payable income tax. Furthermore, it could be seen that managerial ownership had a direct effect on earnings management. Besides, earnings management had a direct effect on payable income tax. Thus, the Sobel test was used to prove the ability of earnings management variables in mediating the effect of managerial ownership on income tax. Future research was expected to expand the main object of observation payable income tax as an tax obligation to ensure that the behavior of the company in doing profit or income management for lowering profit or income could lower or raise the payable income tax.*

**Keywords:** *managerial ownership, payable taxes, discretionary accruals*

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan kunci bagi kelangsungan pembangunan di masa kini dan di masa yang akan datang. Sejak tahun 1983 dan terakhir tahun 2008 pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak, utamanya pajak penghasilan badan. Upaya memperbaiki ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

Upaya pemerintah tersebut adalah dengan menerapkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan diterapkan undang-undang tersebut, ternyata mendapat tanggapan beragam, terutama masyarakat yang terkena dampak secara langsung atas diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu yang terkena dampak langsungnya adalah masyarakat sebagai wajib pajak badan. Terkait dengan wajib pajak badan, diterapkannya UU tersebut

---

Korespondensi dengan Penulis:

**Kiswanto:** Telp./Fax. +62 24 850 8015

E-mail: [kiswantofeunnes@yahoo.com](mailto:kiswantofeunnes@yahoo.com)

banyak upaya yang dilakukan wajib pajak badan untuk menurunkan pajak terutang dengan melakukan manajemen laba (*earning management*). Watts & Zimmerman (1986) mengusulkan hipotesis kos politik (*political cost hypothesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan maka manajer cenderung untuk menanggihkan laba berjalan ke masa yang akan datang. Biaya politik muncul sebagai akibat dari profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer. Jika manajer memandang momen penurunan tarif pajak sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, mestinya perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2008 sehingga laba pada tahun 2008 menjadi rendah. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda. Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menganut prinsip *accrual basis* yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (membandingkan beban dengan pendapatan), (Wulandari dkk., 2004).

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) pada saat diperoleh dan pengakuan beban yang sepadan dengan pendapatan periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan. Sedangkan istilah basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan beban atas dasar kas tunai yang diterima/dikeluarkan. Konsep basis

akrual inilah yang memberikan kebebasan (*discretion*) bagi manajer untuk merekayasa laba dan melakukan *earnings management* (Munfiah, 2003).

Dilihat dari sudut pandang *agency theory*, manajemen laba timbul sebagai akibat timbulnya konflik keagenan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Selanjutnya dalam teori keagenan menyatakan bahwa akibat timbulnya konflik keagenan tersebut memicu timbulnya biaya keagenan yang disebut *agency cost*. Timbulnya *agency cost* tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme kepemilikan manajerial maupun institusional (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Yammeesri & Lodh (1997), struktur kepemilikan dikelompokkan ke dalam kelompok keluarga, manajemen, dan di luar perusahaan. Sementara itu, menurut Brailsford *et al.* (2002), struktur kepemilikan saham dikelompokkan menjadi: pemegang saham institusional, individu, dan manajerial.

Warfield *et al.* (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan saham manajerial kecil tidak leluasa dalam memberikan insentif terhadap manajernya. Yeo *et al.* (2002) menunjukkan bahwa peningkatan diskresioneri akrual pada kepemilikan manajerial yang lebih tinggi konsisten dengan manajemen yang dilakukan dalam perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabrielsen *et al.* (2002) dengan mengambil sampel penelitian perusahaan di Denmark menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mencoba mengkaji apakah kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap besarnya PPh terutang wajib pajak badan melalui *discretionary accruals*. Sehingga diharapkan nantinya akan menemukan bukti apakah dengan besarnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan meningkatkan terjadinya manajemen laba dengan teknik *discretionary accruals*, yang pada akhirnya akan menentukan besarnya pajak terutang yang

ditanggung oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan.

### **Agency Theory**

*Agency theory* menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Eisenhardt (1989) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait dengan teori keagenan, yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan cenderung bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dan hal ini memicu terjadinya konflik keagenan. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *agent* termotivasi untuk memaksimalkan *fee* kontraktual yang diterima sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Sebaliknya, pihak *principal* termotivasi untuk mengadakan kontrak atau memaksimalkan *returns* dari sumber daya untuk menyejahterakan dirinya dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, *agent* sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent*. Kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi.

Watts & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut

dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya, dimana salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah manajemen laba.

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui *positive accounting theory* dan *agency theory*. Watts & Zimmerman (1986) mengusulkan tiga hipotesis yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yaitu sebagai berikut. (1) Hipotesis program bonus (*bonus plan hypothesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer pada perusahaan yang menerapkan program bonus lebih cenderung untuk menggunakan metode atau prosedur-prosedur akuntansi yang akan menaikkan laba periode mendatang ke periode berjalan. (2) Hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* besar atau menghadapi kesulitan utang, maka manajer perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba. (3) Hipotesis kos politis (*political cost hypothesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan maka manajer cenderung untuk menanggukkan laba berjalan ke masa yang akan datang. Biaya politik muncul sebagai akibat dari profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

### **Manajemen Laba**

Banyak ahli yang secara teori telah mendefinisikan manajemen laba, Belkaoui (2006) manajemen laba adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Healy & Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada *stakeholders* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk memengaruhi

hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Sugiri (1998) membagi manajemen laba dalam dua definisi : (a) dalam arti sempit, manajemen laba sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*, (b) dalam arti luas, manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Copeland (1968) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen.

### Pajak Penghasilan Terutang

Adriani (2008) mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Selanjutnya subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Undang-undang terbaru yang mengatur tentang penghasilan adalah UU No.36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur bagaimana cara menghitung PPh terutang seorang wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Perhitungan PPh terutang untuk wajib pajak badan adalah dengan cara mengalikan besarnya laba dengan tarif yang telah ditetapkan dalam UU No.36 Tahun 2008. Laba yang dimaksud untuk bisa dijadikan dasar perhitungan pajak terutang adalah laba komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan, yang kemudian disebut sebagai laba fiskal. Selanjutnya, Scott (2000) menyebutkan berbagai motivasi mengapa perusahaan dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba. Motivasi pajak merupakan motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi diguna-

kan dengan tujuan untuk penghematan pajak penghasilan.

### PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Floracis (2008) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat dijadikan sebagai mekanisme insentif yang potensial untuk membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh jajaran manajemen dapat meningkatkan kejujuran manajemen untuk tidak melakukan manajemen laba yang hanya menguntungkan jajaran manajemen saja. Jensen & Meckling (1976) dan Warfield *et al.* (1995) menyatakan bahwa meningkatnya nilai kepemilikan manajerial dapat meminimalisir perilaku *opportunistic* kalangan manajemen. Dengan demikian maka diharapkan perusahaan sebagai salah satu wajib pajak badan dapat meningkatkan kejujuran mereka untuk membayar kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajibannya adalah PPh badan, dimana untuk menentukan besarnya pajak terutang tersebut adalah berdasarkan laba perusahaan. Sehingga, semakin meningkatnya kepemilikan manajerial akan menurunkan perilaku kalangan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan Khan & Mather (2013), yang menyatakan bahwa terjadi hubungan terbalik antara besarnya kepemilikan manajerial dengan tingkat manajemen laba. Selanjutnya, dari sudut pandang kewajiban perpajakan, dengan menurunnya perilaku manajemen laba akan memengaruhi nilai PPh terutangnya. Berdasarkan fakta inilah maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: kepemilikan manajerial berpengaruh langsung terhadap besarnya PPh terutang.

H<sub>2</sub>: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

H<sub>3</sub>: manajemen laba berpengaruh terhadap besarnya PPh terutang.

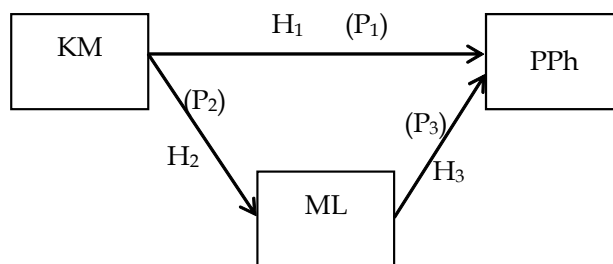
## Kepemilikan Manajerial terhadap Pajak Penghasilan Terutang Melalui *Discretionary Accruals*

*Kiswanto & Ahmad Nurkhin*

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jalur (*path analysis*) dengan mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis jalur digunakan untuk menyelesaikan model penelitian dan hipotesis penelitian. Jalur pemodelan yang digunakan adalah pemodelan dengan lebih dari satu variabel eksogen (*path models with more one exogenous variabel*) (Retherford & Choe, 1993). Dalam hal ini penggunaan *path analysis*, dipandang relevan karena analisis yang akan dilakukan menyangkut hubungan kausalitas antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Selanjutnya, untuk mempermudah olah data statistik inferensial tersebut, maka olah data analisis jalur (*path analysis*) akan menggunakan bantuan *Software SPSS release 19,0* dengan metode regresi yang memiliki variabel moderasi. Model diagram jalur yang diajukan dalam penelitian ini tampak dalam Gambar 1.



**Gambar 1.** Model Diagram Jalur

Keterangan :

KM : kepemilikan manajerial

ML : manajemen laba

PPh : pajak penghasilan terutang

$P_1$  : koefisien pengaruh langsung KM terhadap PPh

$P_2$  : koefisien pengaruh langsung KM terhadap ML

$P_3$  : koefisien pengaruh langsung ML terhadap PPh

Selanjutnya analisis menggunakan pendekatan regresi dengan variabel *intervening* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Ukuran	Sumber
<b>Independen :</b> Kepemilikan Manajerial	Proporsi pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris).	Prosentase saham yang dimiliki Direksi dan komisaris	Jensen & Meckling (1976)
<b>Dependen :</b> Manajemen Laba		Diskresioneri Akrua ( $DACC$ ) <sub>i,t</sub> = { $ACC$ <sub>i,t</sub> - $E(ACC)$ <sub>i,t</sub> } / $ASST$ <sub>i,t-1</sub> $ACC$ <sub>i,t</sub> = Total Akrua sekarang $E(ACC)$ <sub>i,t</sub> = Akrua Normal yang diharapkan $ASST$ <sub>i,t-1</sub> = total asset periode sebelumnya	Khan & Mather (2013)
<b>Intervening :</b> PPh Terutang	Besarnya PPh yang harus dibayar oleh Wajib Pajak	PPh terutang tahun berjalan	UU 36 Tahun 2008

$$ML = \alpha + \beta P2KM + e1..... (1)$$

$$PPh = \alpha + \beta P1KM + \hat{a}P3ML + e2..... (2)$$

Selanjutnya e1 dan e2 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$e1 = \sqrt{(1 - R^2)} \text{ dan } e2 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

e1 adalah jumlah varian variabel ML yang tidak dijelaskan oleh KM, sedangkan e2 adalah jumlah varian PPh yang tidak dapat dijelaskan oleh KM dan ML, sehingga *standardized* koefisien KM pada persamaan (1) akan memberikan nilai P<sub>2</sub> sedangkan koefisien untuk KM dan ML pada persamaan (2) akan memberikan nilai P<sub>1</sub> (merupakan perkalian koefisien P<sub>2</sub> dengan P<sub>3</sub>) dan P3. Selanjutnya untuk membuktikan pengaruh variabel *intervening* signifikan atau tidak maka dilakukan uji *sobel test* dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3}$$

Dengan Sp2p3 sebagai berikut:

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

## HASIL

### Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-2009. Peng-

ambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1) perusahaan terdaftar berturut selama periode pengamatan; (2) menyampaikan laporan keuangan auditan berturut-turut selama pengamatan; (3) perusahaan memiliki data yang dibutuhkan dalam analisis data. Dari kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 129 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

### Uji Goodness Fit Model

Uji *goodness fit* model penelitian ini adalah uji terhadap data yang digunakan dalam penelitian selama tahun 2006-2009 yang merupakan unit pengamatan dalam penelitian. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah pemilihan variabel dalam model penelitian ini *fit* dengan data yang digunakan atau tidak. Dalam penelitian ini ada 4 hal yang diuji, yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Secara ringkas hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan uji asumsi klasik sebagai dasar *fit model* (Tabel 2) dapat diketahui bahwa semua asumsi klasik sudah memenuhi syarat. Dimana uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov di atas 5% yang berarti data berdistribusi normal untuk semua variabel penelitian. Uji multikolinieritas sebagai indikator untuk melihat tidak ada hubungan diantara variabel independen juga menunjukkan bukti bahwa tidak ada hubungan diantara variabel independen dengan nilai VIF kurang dari 10 untuk semua variabel inde-

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Heteroskedastisitas		Multikolinieritas VIF	Autokorelasi Durbin- Watson	Normalitas (Kolmogorov- Smirnov Test)
	t	Sig.			
KM	0,550	0,583	6,437		0,498
KL	115,138	0,348	6,437	1,436	0,876
PPh					0,312

penden. Uji autokorelasi menunjukkan angka 1,436 yang berarti tidak ada gejala autokorelasi antar data penelitian baik tahun pengamatan maupun dengan data sebelum pengamatan. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas juga menunjukkan tanda yang bagus, dimana nilai signifikansi untuk uji glejser berada di atas 5% yang berarti bahwa data penelitian terbebas dari gejala terjadinya hetero.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan metode regresi dengan pendekatan variabel mediasi. Pengujian hipotesis ini melalui dua langkah yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

#### Menghitung koefisien pengaruh langsung antara KM terhadap ML (Persamaan 1)

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa nilai *beta* pengaruh langsung ( $P_2$ ) antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba sebesar 750,372 dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal ini mejadi bukti bahwa hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba dapat diterima.

#### Menghitung koefisien pengaruh langsung antara KM dan ML terhadap PPh (Persamaan 2)

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa nilai *beta* pengaruh langsung ( $P_1$ ) antara kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang sebesar 9,457 dengan tingkat signifikansi 0,000. Selanjutnya nilai *beta* pengaruh langsung ( $P_3$ ) antara manajemen laba terhadap PPh terutang sebesar 292,728 dengan tingkat signifikansi 0,023. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang dapat diterima yang berarti

kepemilikan manajerial berpengaruh langsung terhadap PPh terutang. Selanjutnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh langsung antara manajemen laba terhadap PPh terutang di bawah 5% sehingga hipotesis ke-3 dapat diterima yang berarti bahwa manajemen laba memiliki pengaruh langsung terhadap PPh terutang, sehingga hipotesis ke-3 diterima.

Langkah berikutnya adalah membuktikan variabel manajemen laba dalam memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang, dimana hal ini merupakan hipotesis ke-3 dalam penelitian ini. Pembuktian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p^2 Sp^2 + p^2 Sp^2 + Sp^2 Sp^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(292.728)^2 (31.283)^2 + (750.372)^2 (0.099)^2 + (31.283)^2 (0.099)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{83858158.348 + 5518.533 + 9.592}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{83,863,686.472}$$

$$Sp_{2p3} = 9157,712$$

Selanjutnya, menghitung nilai t hitung dengan rumus berikut:

$$t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}}$$

$$t = \frac{(750.372)(292.728)}{9157.712}$$

$$t = \frac{219,654.895}{9157,712}$$

$$t = 23,986$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai t hitung sebesar 23,986, angka ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis t tabel dengan tingkat signifikansi 5% didapat t tabel sebesar 1,96, sehingga nilai t hitung ini lebih besar daripada nilai t tabel, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dapat memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang. Hal ini berarti bahwa variabel manajemen laba melalui diskresioner akrual dapat memperkuat atau memperlemah tindakan manajemen

perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam rangka pengaturan beban pajak penghasilannya.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pajak. Hal ini dapat dipahami karena kecenderungan manajemen berorientasi dan termotivasi atas beberapa hal, antara lain: *bonus scheme*, *debt covenant*, *political motivation*, *taxation motivation*, pergantian CEO, dan *initial public offering* (Scott, 2000). Oleh karena itu, motivasi pajak adalah bertujuan untuk menurunkan besarnya pajak yang ditanggung perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Munfiah (2003) tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2008 dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khan & Mather (2013). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan saham oleh manajemen maka akan semakin tinggi juga manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manajemen itu sendiri. Ada berbagai macam motivasi yang mendasari manajemen dalam melakukan manajemen laba seperti yang diungkapkan oleh Scott (2000) antara lain (1) *bonus scheme*, (2) *debt covenant*, (3) *political motivation*, (4) *taxation motivation*, (5) pergantian CEO, dan (6) *initial public offering*.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap PPh terutang dapat diterima. Hal ini berarti bahwa seorang manajer memiliki motivasi yang tinggi untuk menurunkan pajak penghasilan terutang de-

ngan melakukan manajemen laba melalui usaha menurunkan laba yang diperoleh perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim (2009) dan Wijaya & Martani (2011). Hasil keduanya menunjukkan adanya manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian dengan menggunakan uji Sobel untuk menguji variabel moderasi diperoleh bahwa variabel manajemen laba yang diprosikan dengan diskresioner akrual diketahui bahwa variabel manajemen laba mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang. Hal ini berarti bahwa manajemen laba akan mampu memperbesar atau memperkecil pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pajak penghasilan terutang. Sehingga kepemilikan manajerial ini akan berkontribusi terhadap perilaku manajemen untuk melakukan manajemen laba atau tidak melakukan manajemen laba yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap PPh terutang perusahaan sebagai wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh langsung terhadap PPh terutang. Selanjutnya juga dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh langsung terhadap manajemen laba, selain itu manajemen laba berpengaruh langsung terhadap PPh terutang. Sehingga dengan uji sobel untuk membuktikan kemampuan variabel manajemen laba dalam memediasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap PPh dapat terbukti. Oleh karena itu hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba adalah variabel moderasi yang dapat memoderasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan kepemilikan manajerial yang semakin besar maka akan lebih cende-



## Kepemilikan Manajerial terhadap Pajak Penghasilan Terutang Melalui *Discretionary Accruals*

Kiswanto & Ahmad Nurkhin

rung untuk melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk mendapatkan *reward* melalui penurunan PPh terutang sebagai akibat dari manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen melalui penurunan nilai laba yang diperoleh perusahaan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba mampu memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap PPh terutang, oleh karena itu bagi perusahaan disarankan untuk mengatur besarnya kepemilikan saham oleh jajaran manajerial. Hal ini perlu dilakukan karena semakin besar kepemilikan saham oleh jajaran manajerial dapat lebih mudah mengatur besarnya PPh terutang perusahaan yang sah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, dari sisi pengembangan ilmu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep manajemen laba yang dilakukan perusahaan, utamanya aspek perilaku sebagai upaya perusahaan dalam mengatur besarnya PPh terutang melalui laba bersih perusahaan sebagai dasar perhitungan PPh terutang. Sehingga penelitian mendatang diharapkan mengkaji lebih lanjut aspek perilaku manajemen perusahaan dalam upaya mengatur besarnya PPh terutang. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya aspek perilaku dalam melakukan manajemen laba, utamanya adalah perilaku manajemen dalam perlakuan dan pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya-biaya sebagai dasar penentuan laba perusahaan sekaligus dasar perhitungan PPh terutang. Sehingga variabel konservatisme dalam pengakuan pendapatan dan biaya dapat dijadikan sebagai variabel dalam penelitian mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. 2009. Manajemen Laba dengan Motivasi Minimalisasi Pajak pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3): 444-461.
- Brailsford, T.J., Oliver, B.R., & Pua, S.L.H., 2002. On the relation between Ownership Structure and Capital Structure. *Journal of Accounting and Finance*, 42(1): 1-26.
- Eisenhardt, K.M. 1989. Building Theories from Case Study Research. *The Academy of Management Review*, 14(4): 532-550.
- Floracis, C. 2008. Agency Cost and Corporate Governance Mechanisms: Evidence for UK Firms. *International Journal of Managerial Finance*, 4(1): 37-59.
- Gabrielsen, G., Gramlich, J.D., & Plenborg, T. 2002. Managerial Ownership, Information Content of Earnings and Discretionary Accruals in a Non-US Setting. *Journal of Business Finance & Accounting*, 29(7/8): 967-988.
- Healy, P.M. & Wahlen, J.M. 1999. A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4): 365-383.
- Jensen, M. & Meckling, W. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.
- Khan, A. & Mather, P. 2013. The Value of Executive Director Share Ownership and Discretionary Accruals. *Accounting Research Journal*, 26(1): 35-55.
- Munfiah, S. 2003. Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax. *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya
- Scott, W. 2000. *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*
- Utami, W. 2005. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur). *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, hlm. 100-116
- Warfield, T.D., Wild, J.J., & Wild, K.L. 1995. Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 20: 61-91.
- Wijaya, M. & Martani, D. 2011. Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menanggapi Penurunan Tarif

- Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi 11. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Wulandari, D., Kumalahadi, & Prasetyo, J.E. 2004. Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali
- Yammeesri, J. & Lodh, S.C. 2003. The Effects of Ownership Structure on Firm Performance: Evidence from Thailand. *Hawaii International Conference on Business*. Honolulu, Hawaii.
- Yeo, H.H., Tan, M.S., Ho, K.W., & Chen, S. 2002. Corporate Ownership Structure and Informativeness of Earnings. *Journal of Business Finance and Accounting*, 29(7/8): 1023-1046.